BAB V

PEMBAHASAN

A. Tradisi *Kudangan* dalam Pernikahan Adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Berdasarkan temuan penelitian, tradisi *kudangan* dalam adat Betawi adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Betawi pada saat sebelum acara pernikahan dengan tujuan untuk melestarikan budaya khas yang telah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang sehingga dengan melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini dapat mencerminkan rasa penghormatan terhadap budaya atau tradisi adat Betawi. '*Urf* atau adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan secara terus menerus dalam bentuk kata-kata dan tindakan. '*Urf* shahih adalah '*urf* yang baik yang boleh dilakukan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil, dan tidak ada pembatalan yang wajib. Pada saat yang sama, '*urf* fasid adalah '*urf* itu tidak baik dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'.¹

Sedangkan Adat merupakan kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal. '*Urf* dan Adat merupakan sinonim dari dua kata yang memiliki satu makna yang sama.² Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kategori '*urf*, maka dengan demikian pelaksanaan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi bisa dikatakan sebagai kategori '*urf* dikarenakan

¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), Cet ke-3, hlm. 89.

² Muhammad Tahmid dan Nur Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualitas Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hlm. 21.

dari berbagai macam kategori dalam tradisi ini terpenuhi. Tujuan dari tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini adalah sebagai penghormatan terhadap kaum wanita, hal ini sejalan dengan ‘urf yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan. Pada hal ini tidak sedikit permasalahan fiqih yang berdasarkan dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu, apalagi syari’at Islam hanya menetapkan suatu ketentuan yang mutlak tanpa ada batasan dari segi nash itu sendiri dan dari segi kebahasaan:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى

العرف

“Setiap ketentuan yang dikeluarkan syara’ sama sekali tidak ada batasan dalam syara’ atau dalam istilah bahasa sehingga dikembalikan ke ‘urf atau adat kebiasaan.”³

Jika kita melihat dari segi penilaiannya, bahwa ‘urf terbagi menjadi dua: ‘urf *shahih*, yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’ dan ‘urf *fasid*, yaitu ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’.⁴ Tradisi *kudangan* dalam adat betawi merupakan perkataan dari orang tuanya perempuan yang merupakan tradisi atau kebudayaan dalam adat Betawi, jika dilihat dari kejadiannya tidak ada perbuatan atau unsur yang melarang sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Sejatinya kita pahami bahwa akad

37. ³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa`adiyah Putera,tt), Cet. ke-1, hlm.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jkarta: Majelis Al-a`la,1972), Cet ke-3, hlm. 89.

nikah dimaksudkan untuk mencari kebahagiaan bersama dan mencari keturunan dengan cara yang diridhoi Allah SWT, oleh karena itu akad nikah antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan membuat persyaratan yang sudah disepakati kedua mempelai dan menjadi kemauan masing-masing. Setiap selama persyaratan yang sudah disepakati tersebut tidak melanggar maksud dari pernikahan.⁵

Berkaitan dengan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi, seperti yang dikatakan penulis di atas, kita harus mencermati maslahat dan mudharatnya. Maslahatnya, tradisi *kudangan* dalam adat betawi ini merupakan acara yang dapat memeriahkan suatu acara pernikahan adat betawi dan menjalankan tradisi yang ada di kalangan masyarakat Betawi, dengan hal ini pernikahan pada masyarakat adat Betawi lebih meriah. Kalaupun jika tidak ada pemberian *kudangan*, tidak akan mengurangi keabsahan akad nikah yang dijalankan dan dibolehkan oleh syari'at Islam sebab tidak menyimpang dengan syari'at Islam. Menurut syari'at Islam, kita diperbolehkan untuk menghidupkan suatu acara pernikahan dengan melaksanakan acara walimah yaitu acara resepsi dalam pernikahan seperti yang dijelaskan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari.

أَوْلَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), cet ke-2, hlm. 45.

“Laksanakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing” (H.R Muslim dan Bukhari).⁶

Untuk menghidupkan acara pernikahan tersebut, masyarakat yang akan mengadakan acara pernikahan itu akan mengumumkan lewat undangan tertulis maupun tidak tertulis. Itu semua tergantung masyarakat yang mengadakan acara pernikahan itu sendiri. Sedangkan apabila kita lihat dari segi mudharatnya, jika seorang perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sanggup atau tidak mampu memenuhi pemberian *kudangan* untuk pihak perempuan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut dilarang oleh syari’at Islam, karena Hukum Islam melarang pemberian *kudangan* dalam pernikahan secara berlebihan sebab bisa menghambat suatu akad pernikahan. Sedangkan jika tidak ada permintaan *kudangan*, tidak akan mengurangi ataupun membatalkan keabsahan suatu akad pernikahan.

B. Pendapat Ulama Muhammadiyah Tentang Tradisi *Kudangan* dalam Adat Betawi

Pendapat ulama Muhammadiyah tentang tradisi *kudangan* dalam adat betawi adalah bahwa tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat betawi boleh dilaksanakan tetapi tidak wajib karena tidak terdapat dalam rukun dan syarat pernikahan. Menurut hukum Islam, seorang laki-laki yang ingin menikahi

⁶ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ihya, Al-Tirats al-Araby, t.t), Juz II, hlm. 31.

seorang perempuan wajib memberikan mas kawin (mahar), sebagaimana dijelaskan dalam Al Qu'an Surat An Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Q.S. An Nisa 24)

Jadi, suatu tradisi yang sudah terdapat di kalangan masyarakat sebelum mengetahui dalilnya maka tidak dapat dikatakan sah atau tidak. Seperti yang ditegaskan di dalam Al Qur'an Surat Al-Isra ayat 36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ مُسْتَوْلاً

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S. Al Isra 36)

Maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya suatu perbuatan yang tidak anda pahami isinya pasti akan menimbulkan opini yang tidak baik terhadap sesuatu yang akan menimbulkan pembenaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pendapat Muhammadiyah ini bertolak belakang dengan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi, di mana ulama Muhammadiyah tidak memperbolehkan dilaksanakannya tradisi tersebut dengan penuh keyakinan. Karena suatu tradisi, jika diyakini sebagai suatu kewajiban, termasuk sebagai bid'ah yang tercela.

وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Jauhilah semua perkara baru (dalam agama), karena semua perkara baru (dalam agama) adalah bid'ah, dan semua bid'ah merupakan kesesatan”

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Muhammadiyah mempunyai pandangan segala perbuatan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul dan Sahabat, serta harus sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadits. Maka mereka menolak segala sesuatu yang tidak ada dalil dan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul Sebelumnya.

C. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Tradisi *Kudangan* dalam Adat Betawi

Pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi adalah harus bagi laki-laki yang hendak menikahi perempuan namun tidak terdapat di dalam rukun dan syarat pernikahan. Artinya, jika tidak ada pemberian *kudangan* dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut sah menurut syari'at Islam. Dasar hukum *tradisi kudangan* dalam adat Betawi memang tidak ada di Al Qur'an dan Hadits. Namun ada dasar hukum untuk mahar. Dengan adanya tradisi *kudangan* dalam adat Betawi menaikkan status perempuan karena *kudangan* diberikan sebagai tanda penghormatan terhadap perempuan.⁷ *Kudangan* ditentukan atas permintaan dari pihak perempuan, sedangkan jumlah atau besarnya mahar tidak ditentukan, semua ini didasarkan pada kesanggupan dari pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, selama memiliki manfaat dan nilai dan telah disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.⁸

Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi di Kampung Dua Jakasampurna ini merupakan suatu tradisi menerka-nerka dimana ketika *kudangan* diberikan oleh suami dan bentuk sesuatu yang diinginkan oleh pihak perempuan. Dalam tradisi ini juga sebagai bentuk kasih sayang orang tua supaya anaknya mendapatkan apa yang diinginkan sejak masih kecil, dan hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan jika dilaksanakan akan merasakan kepuasan

⁷ Abdurahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: PT. Rimeka Cipta, 1992), Cet ke 1, hlm. 64.

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah, Terjemahan.jilid 6*, (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1987), Cet ke 5, hlm. 54.

tersendiri. Ketika melihat tata cara pelaksanaan tradisi tersebut banyak sekali terdapat perlengkapan dan persyaratan yang tidak ada unsur menghalalkan sesuatu yang diharamkan begitupun sebaliknya, namun di dalam persyaratan dan perlengkapan tersebut terdapat makna yang dianggap baik oleh masyarakat Kampung Dua Jakasampurna yang dimaksudkan untuk melaksanakan tradisi *kudangan*. Maka dari itu pelaksanaan tradisi ini boleh-boleh saja ketika tidak menyalahi ajaran dalam syari'at Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi:

مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

“Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai suatu yang baik maka menurut Allah hal itu baik pula (HR.Muslim)”.⁹

Dalil tersebut dijadikan oleh ahli fiqih, hadits serta ulama guna mengembangkan ‘*urf* serta *maslahat* yang memiliki arti suatu kebaikan yang bersifat global, sosial, guna untuk perkara umat.

Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini bisa dimasukkan ke dalam kategori ‘*urf shahih* dan ‘*urf khas* karena sama sekali tidak terdapat hal-hal yang mengandung unsur yang bertentangan dengan *nash* dan tidak terdapat unsur-unsur yang menyakiti, serta hanya berlaku di daerah atau lingkungan tertentu, tidak diberlakukan di tempat lain, tidak pula menimbulkan *mudharat* bagi mereka, asal kemaslahatan dan kemudharatan terhadap tradisi *kudangan* dalam adat Betawi, ‘*urf* mengambil peran untuk mengetahui kemaslahatan dan kemudharatan tersebut selama tidak ada dalil khusus yang menjelaskan. Dengan demikian, suatu perkara yang sudah menjadi suatu kebiasaan

⁹ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018), hlm. 21.

manusia jika menimbulkan suatu kemaslahatan maka dikembalikan kepada pembolehan.¹⁰ Suatu tradisi yang dijalankan jika tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka diperbolehkan seperti dalam aturan kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Hukum dasar segala sesuatu itu boleh, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya".¹¹

Dalam pembentukan fiqh, madzhab, fuqaha banyak dalam memperhatikan 'urf lokal. Misalnya Imam Malik dalam mengembangkan madzhab pemikirannya lebih menitikberatkan pada amalan para ulama fiqh Madinah.¹² Karena banyak syari'at Islam yang didasarkan pada penetapan hukum tentang 'urf atau adat kebiasaan masyarakat, seperti mengi'tibarkan kafa'ah dalam urusan pernikahan dan sebagainya.¹³ Oleh karena itulah, adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam bisa menjadi pertimbangan sebagai sumber pemulihan hukum.

Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa melaksanakan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini tidak dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram. Namun, jika dilaksanakan tidak dilarang, karena termasuk melestarikan tradisi dan kebudayaan. Dari pandangan tersebut dapat

¹⁰ Muhammad Tahmid dan Nur Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualitas Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hlm. 43.

¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 161.

¹² Muktar Yahya dan Fatur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), cet ke-1, hlm. 518.

¹³ Hasbi Assidhiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1986), Cet ke-1, hlm. 45.

disimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama dalam memahami dalil yang lebih luas, terlihat dari dalil yang dijadikan dasar hukum kaitannya dengan tradisi *kudangan* dalam adat betawi sebagai bentuk pelestarian kebudayaan, dan jika ada tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam maka akan meluruskan tradisi tersebut untuk mematuhi syari'at tanpa harus menghilangkan tradisi yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits:

إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

“Bertakwalah kepada Allah di manapun kalian berada ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik”

Jadi melakukan hal yang baik kepada manusia itu menyesuaikan dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i, serta menjaga dan melestarikan budaya maupun tradisi tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.